

	News Title : Indonesia Siap jadi Pusat Kripto di Asia	
	Media Name : harianhaluan.com	Journalist : Muhammad Yusuf Firdaus
	Publish Date : 27 August 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Claudia Kolonas (Co-Founder Pluang)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : News	Topic : Kripto

Indonesia Siap jadi Pusat Kripto di Asia

Muhammad Yusuf Firdaus - Selasa, 27 Agustus 2024 | 16:53 WIB



Mewujudkan Indonesia Sebagai Crypto Hub Asia

HARIANHALUAN.COM- Kabaranya [Indonesia](#) akan mencetak sejarah jadi negara pertama di dunia yang operasikan bursa [kripto](#), ditambah Badan Pengawas Berjangka Komoditi ([Bappebti](#)) menyatakan penyempurnaan regulasi sedang dikaji di kementerian terkait.

Kepala Bappebti Kasan menjelaskan, pemerintah berupaya terus melakukan evaluasi regulasi dan roadmap agar memastikan industri kripto di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

"Kita ingin melihat apakah regulasi dan roadmap saat ini sudah sesuai dan mampu mendorong potensi kripto yang luar biasa di Indonesia," kata Kasan dalam acara Economic Prospective 2025 by B-Universe di Jakarta.

Baca Juga:
[Puluhan Atlet Bukittinggi Siap Berjuang di PON 2024, Targetkan Sumbang Medali](#)

Semenjak tahun 2018 lalu, kripto sudah diakui sebagai komoditas bukan sebagai alat pembayaran.



Advertisement

Ini juga beriringan dengan Undang-Undang mata uang yang menyebutkan bahwa satu-satunya mata uang yang sah di Indonesia yaitu Rupiah.

Kripto yang menjadi komoditas, tentu Bappebti memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan pengaturannya.

Baca Juga:
[Tagor 'UMS Mendunia' Trending di Media Sosial X, Ada Apa?](#)

Tetapi dengan terbitnya UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), tentang pengaturan dan pengawasan industri kripto akan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ([OJK](#)) paling lambat 10 Januari 2025.

Untuk saat ini, proses pengalihan tersebut sedang berlangsung dengan melibatkan kerja sama dari Bappebti, PJK, dan Bank Indonesia (BI).

"Kami dari Bappebti terus berupaya untuk koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan transisi pengawasan ini agar berjalan mulus tanpa adanya hambatan yang merugikan industri ataupun investor," jelas Kasan.

Baca Juga:
[Pemkab Agam Gelar Capacity Building untuk Optimalisasi Kinerja TPID](#)

Ia menambahkan untuk tim transisi juga dibentuk dengan melibatkan Bappebti, OJK, dan BI.

Selain itu, akan muncul Memorandum of Understanding (MoU) di antara ketiga lembaga demi memastikan kelancaran proses peralihan ini.

Kasan juga mengingatkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang mengatur industri kripto, yang mana bursa dan kliring kripto telah dibentuk.

Baca Juga:

Viral Polwan Tegur Pria Saat Sedang Makan Berujung Dihujat Netizen, Kini Minta Maaf: Semuanya Sudah Selesai

Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang aman dan teratur.

"Di negara lain, belum terdapat regulasi yang seketat di Indonesia," tambahnya.

Kripto memiliki jumlah pengguna yang sudah mencapai 20,6 juta orang yang membuat sektor ini bisa menjadi pilar ekonomi digital di masa depan.

Baca Juga:

44 Hektare Lahan Senilai Rp112 Miliar Sudah Dibebaskan, Begini Kabar Terbaru Proyek Jalan Tol Sepanjang 95 Km di Bali

Advertisement

"Kita terus berharap transisi ini bisa berlangsung dengan lancar, jadi kripto ini bisa tumbuh dan menjadi bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia," tuturnya.

Di sisi lain, Co-Founder Pluang Claudia Kolonas melihat Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat kripto di masa depan.

Hal tersebut karena pengguna kripto di Indonesia terus meningkat, seiring dengan tren global yang semakin positif.***